

KESETARAAN GENDER PADA KELUARGA PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG

S. Soraida¹, Yunindyawati¹, G. Isyanawulan¹

¹Jurusan Sosiologi, Universitas Sriwijaya, Palembang
Corresponding author: Safira.adiutama@gmail.com

ABSTRAK: Kesetaraan gender di dalam keluarga sama halnya dengan kesetaraan gender di dalam masyarakat sebagai asas pembangunan yang setara dan adil. Kesetaraan gender di dalam keluarga bukan saja mendorong perempuan untuk memiliki pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan laki-laki di sektor publik tapi bagaimana laki-laki berperan aktif di dalam pekerjaan domestik terutama di dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak di dalam keluarga oleh laki-laki dalam hal ini adalah sosok seorang ayah baik secara fisik maupun psikologis sangatlah penting, hal ini disebabkan ketidakadaan figur ayah dalam keluarga yang sering dikenal dengan istilah *fatherless*. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta analisis menggunakan analisis Mosser. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk kesetaraan gender, latar belakang terbentuknya kesetaraan gender serta faktor yang menghambat kesetaraan gender pada keluarga perkotaan di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kesetaraan gender pada keluarga perkotaan di Kota Palembang yaitu adanya kesetaraan dalam urusan pekerjaan domestik dan di dalam menentukan akses pendidikan dan kesehatan. Adapun yang melatarbelakangi kesetaraan gender yaitu tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga. Sedangkan faktor yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender yaitu agama yang dianut, tradisi dan budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keluarga, Perkotaan

ABSTRACT: Gender equality in the family is the same as gender equality in society as a principle of equal and equitable development. Gender equality in the family not only encourages women to have education and work that is equal to men in the public sector but how men play an active role in domestic work especially in childcare. Nurturing children in the family by men in this case is the figure of a father both physically and psychologically very important, this is due to the absence of a father figure in the family which is often known as fatherless. The approach in this study uses qualitative methods, with data collection techniques through observation and interviews, and analysis using Mosser analysis. This study aims to describe and analyze the forms of gender equality, the background of the formation of gender equality and the factors that inhibit gender equality in urban families in the city of Palembang. The results of this study indicate that the form of gender equality in urban families in the city of Palembang is the existence of equality in domestic work matters and in determining access to education and health. As for the background of gender equality, namely the level of education and family economic conditions. While the factors that hinder the realization of gender equality are the religion that is embraced, tradition and culture, and the social conditions of the local community.

Keywords: Gender Equality, Family, Urban

PENDAHULUAN

Gender yang diperkenalkan oleh ilmuwan sosial adalah gender yang menjelaskan perbedaan seorang perempuan dan laki-laki yang bersifat bentukan dari sebuah budaya yang terus diwariskan, disosialisasikan dan terus dipelajari dari lahir hingga dewasa. Gender juga dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai

hasil dari konstruksi sosial budaya melalui proses sosialisasi dari masa ke masa. Dengan demikian, gender akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang akan datang.

Kesetaraan gender muncul karena ketidakadilan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, seperti perempuan dianggap kaum yang lemah dengan hanya memiliki pekerjaan domestik, lain halnya dengan laki-laki yang memiliki peran di sektor publik, sehingga

kaum perempuan termarginalkan. Kesetaraan atau keadilan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran berdasarkan jenis kelamin, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki, dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat setara dan adil dari pembangunan.

Kesetaraan gender di dalam keluarga sama halnya dengan kesetaraan gender di dalam masyarakat sebagai asas pembangunan yang setara dan adil. Kesetaraan gender di dalam keluarga bukan saja mendorong perempuan untuk memiliki pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan laki-laki di sektor public tapi bagaimana laki-laki peran aktif di dalam pekerjaan domestic terutama di dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak di dalam keluarga oleh laki-laki dalam hal ini adalah sosok seorang ayah baik secara fisik maupun psikologis sangatlah penting, hal ini disebabkan ketidakadaan figure ayah dalam keluarga yang sering dikenal dengan istilah *fatherless*.

Permasalahan *fatherless* telah menjadi permasalahan seluruh dunia, hal ini disebabkan karena dampak dari *fatherless* bukan hanya berdampak pada keluarga saja tapi ke kehidupan bermasyarakat seperti kasus bunuh diri pada remaja, anak jalanan, pemerkosaan serta putus sekolah yang makin meningkat.

Permasalahan akan *fatherless* inilah yang membuat penelitian ini menjadi urgensi untuk diteliti dengan rumusan masalah “bagaimana kesetaraan gender pada keluarga perkotaan di Kota Palembang”, adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kesetaraan gender pada keluarga perkotaan di Kota Palembang?
2. Apa yang melatarbelakangi kesetaraan gender pada keluarga perkotaan di Kota Palembang ?
3. Apa faktor yang menghambat kesetaraan gender pada keluarga perkotaan di Kota Palembang ?

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, oleh Fibrianto (2016), dari Universitas Sebelas Maret dengan judul “*Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016*” dari Jurnal Analisa Sosiologi Volume 5, Nomor 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui wujud kesetaraan gender di lingkup organisasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016. Metode yang digunakan yaitu

deskriptif kualitatif dan validitas datanya berupa triangulasi sumber. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara pada organisasi mahasiswa di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada semua organisasi kampus terdapat dominasi, dimana laki-laki sebagai ketua atau pimpinan organisasi, sedangkan seorang perempuan hanya menjabat sebagai sekretaris, bendahara ataupun anggota. Fakta menunjukkan belum ada kesetaraan dan juga keadilan gender (KKG) maupun pengarus Utamaan gender (PUG) di setiap organisasi mahasiswa, sehingga kaum perempuan masih berada pada strata kedua setelah laki-laki.

Kedua, penelitian oleh Widayani dan Hartati (2014) dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang dan Universitas Diponegoro. Penelitian berjudul “*Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan di Bali*”, dari Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro Volume 13, Nomor 2. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan persepsi perempuan Bali terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam ruang lingkup budaya Bali. Penelitian menggunakan metode kualitatif-fenomenologis. Subjek penelitian sebanyak tiga orang yang diperoleh melalui hasil penelusuran literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKG dimaknai berbeda oleh tiap subjek. Subjek 1 menganggap budaya patriarki Bali adalah setara dan adil secara gender, sedangkan Subjek 2 dan 3 menyatakan budaya patriarki Bali tidaklah setara dan adil secara gender. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh terselesaikan atau tidaknya permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing subjek akibat budaya patriarki Bali. Proses pembentukan persepsi terhadap KKG dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti: kebudayaan Bali, pendidikan, pola asuh) dan faktor internal (seperti kebutuhan, sikap, konsep diri, penyesuaian diri, keyakinan, harapan di masa depan, penilaian perempuan Bali, keluarga dan anak, resistensi sebagai manifestasi dari permasalahan yang dihadapi tiap subjek; serta dukungan sosial sebagai faktor pendukung subjek dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi).

Ketiga, penelitian oleh Ampera (2012) dosen Jurusan PKK FT Unimed dengan judul “*Kajian Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD*”, dari jurnal Tabularasa Volume 9, Nomor 2. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh siswa Sekolah Dasar mengenai pemahaman gender, serta untuk mengungkapkan berbagai kondisi gender yang telah

lama tersosialisasi begitu lama dalam sistem sosial masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif dengan metode survei. Lokasi penelitian bertempat di Mebidang, responden merupakan siswasiswi SD yang aktif sekolah. Hasil analisa penelitian, disimpulkan bahwa responden (70,69%) tidak mengetahui dengan baik gender sebenarnya. Hampir keseluruhan responden (52,81%) melekatkan gender dan jenis kelamin memiliki pengertian yang sama.

Keempat, penelitian oleh Mahpur (2012), dosen Psikologi UIN Malang dengan judul “*Baseline Study Kesetaraan Gender di UIN Malang*”, dari jurnal *Egalita* Volume 1, Nomor 2. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyelenggaraan pendidikan di UIN Malang dalam memperlihatkan realitas pembangunan yang berkeadilan gender, mengetahui apa visi dan misi UIN Malang serta acuan dasar hukum (statuta) yang dijadikan pijakan pembuatan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan di UIN Malang, mengetahui proses pendidikan di UIN Malang bergerak kearah semangat sosialisasi nilai dan gagasan yang memperjuangkan kesetaraan relasi gender dan mengetahui bagaimana tanggapan civitas akademika UIN Malang, terutama pada jajaran pimpinan terhadap usaha pengarusutamaan gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status baru sebagai Universitas tujuan umum dari UIN Malang yang dirumuskan lebih rinci pada visi dan misi yang dibangun menunjukkan adanya netralitas gender (*gender blind*). Perguruan tinggi Islam ini tidak menekankan pembangunan intelektual civitas akademikanya pada salah satu jenis kelamin tertentu. Hal ini dapat dilihat pada penjabaran visi dan misi UIN Malang yang tidak disebutkan jenis kelamin tertentu akan tetapi pada seluruh mahasiswa secara umum. Dengan visi misi yang netral gender menjadi suatu peluang bagi UIN Malang sebagai salah satu wadah transfer ilmu bagi masyarakat untuk membantu terlaksananya upaya sosialisasi pengarus utamaan gender baik dalam lingkup internal kampus (seluruh civitas akademika).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2010) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret yang berjudul “*Relasi Gender pada Keluarga Perempuan Pedagang di Pasar Klewer Kota Surakarta*”. Tujuan penelitian untuk mengetahui profil aktivitas baik produksi, reproduksi maupun sosial kemasyarakatan. Serta akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki dan faktor-faktor yang berpengaruh pada keluarga perempuan pedagang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi dalam kegiatan produksi maupun reproduksi, suami dan istri saling melakukan pembagian kerja

berdasarkan konsensus yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Tetapi, meskipun terdapat partisipasi dari laki-laki/suami, tetap saja porsi perempuan baik dalam kegiatan produksi maupun reproduksi tetaplah lebih besar. Sedangkan pada kegiatan sosial kemasyarakatan laki-laki dan perempuan mengambil porsi yang sama besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Keunggulan dari penelitian kualitatif yaitu berupaya untuk mengungkapkan makna yang ada dibalik data yang tampak (Taufiq dalam Bungin, 2013: 47). Strategi penelitian menggunakan fenomenologi. Fenomenologi yaitu suatu penelitian yang melihat atau menengamati terkait suatu fenomena yang ada pada kehidupan manusia. Unit analisis pada penelitian ini adalah kelompok yaitu keluarga perkotaan yang ada di Kota Palembang.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara *snowball* yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian (Kaelan, 2012:89).

Adapun kriteria informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keluarga perkotaan yang telah berkeluarga minimal 10 tahun
2. Keluarga perkotaan yang telah memiliki anak
3. Keluarga perkotaan yang telah menetap di Kota Palembang minimal 5 tahun
4. Keluarga perkotaan yang memiliki latar belakang pendidikan, suku, agama dan ras yang berbeda di Kota Palembang

Penelitian ini dilaksanakan lebih kurang selama dua bulan yaitu pada Juli – Agustus 2019 dalam bentuk penelitian lapangan pada beberapa lokasi di Kota Palembang, khususnya di Kampung Arab Al-Munawar tepatnya di lorong Al-Munawar No. 13 kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti memperoleh data, dan wawancara dilakukan pada 26 keluarga perkotaan di kota Palembang dengan jumlah informan 61 orang yang terdiri dari 31 informan laki-laki dan 30 informan perempuan. Adapun observasi dilakukan peneliti dengan mengamati langsung aktivitas

dan kegiatan dalam kehidupan keluarga yang menjadi objek penelitian ini, serta dokumentasi juga digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berupa surat-surat, catatan harian, foto, dan juga dari buku, koran, dan majalah.

Penelitian ini menguraikan jawaban informan dengan menggunakan analisis gender yang digunakan oleh Calorine Moser (1993). Kerangka analisis Moser yaitu didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender (*Gender and Development/ GAD*) yang dibangun pada pendekatan perempuan dalam pembangunan.

Teknik analisis data yaitu dari Creswell (2013: 276) yang mengajak peneliti untuk melihat analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Lebih lanjut, Creswell (2013, 276-284) menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut ini :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.
6. Langkah terakhir yaitu interpretasi data (memaknai data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kesetaraan Gender pada Keluarga di Kota Palembang

1. Akses Pendidikan

Dalam kehidupan keluarga, keputusan terkait pendidikan anak biasanya masih ditentukan oleh orangtua. Berbekal pengetahuan dan pengalaman hidup yang lebih banyak, setiap orangtua merasa memiliki kuasa untuk menentukan model pendidikan yang tepat untuk anak-anaknya. Bagi orangtua yang memiliki latar belakang agama yang kuat, pendidikan berbasis agama menjadi pilihan utama. Sementara bagi orangtua dengan latar belakang pendidikan umum, maka pendidikan pada sekolah dan perguruan tinggi umum adalah alternatif paling baik dipilih untuk anak-anaknya dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Al-Kaff tentang perbandingan akses pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sama aja. Tapi untuk anak laki-laki pendidikan agama itu diutamakan. Di rumah itu, anak diwajibkan harus bisa baca tulis al-qur’an. Kalo di kampung ini, pendidikan agama nomor satu. Sebabnya tiap malam kalo kamu datang ada madrasah untuk ngaji dan ngafal qur’an. Di madrasah itu, setiap habis maghrib sampai jam delapan. Disini kan orang fokuskan anak untuk bisa baca tulis qur’an. Kalo sekolah malem itu untuk laki laki. Kalo perempuan siangnya.”
(Wawancara 17 Agustus 2019).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, diketahui informan Abdullah Al-Kaff dalam menentukan pendidikan anaknya, tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki atau perempuan. Namun, tetap mewajibkan setiap anaknya untuk menempuh pendidikan berbasis agama Islam yang dapat ditempuh melalui pendidikan formal seperti madrasah sementara pendidikan berbasis Islam yang bersifat non formal dapat diperoleh melalui pengajian yang terletak didalam wilayah Kampung Arab Al-Munawwar.

Bentuk kesetaraan gender di bidang pendidikan dalam keluarga suku Arab di Kampung Al-Munawwar dapat dilihat dari tidak adanya pembatasan akses pendidikan yang diterapkan pada anak laki-laki maupun perempuan. Setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk memilih pendidikan yang dikehendaki dengan syarat tidak mengenyampingkan pendidikan berbasis Islam (mengaji).

Bentuk kesetaraan gender lain dalam mengakses pendidikan pada keluarga Arab di Kampung Al-Munawwar diantaranya berupa adanya dorongan dari orang tua kepada anaknya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Pada dasarnya, bentuk kesetaraan gender dalam bidang pendidikan pada masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Arab Al-Munawwar, memiliki pola-pola yang tidak jauh berbeda. Orangtua di Kampung Arab Al-Munawwar tidak memberi perlakuan berbeda pada anak laki-laki maupun anak perempuan dalam mengakses pendidikan sebagaimana yang anak-anak inginkan. Selain itu, orangtua juga melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan tanpa melihat status gender. Meskipun demikian, orangtua tetap mengarahkan anak-anaknya untuk menomorsatukan pendidikan berbasis agama dibandingkan pendidikan umum. Hal ini sudah menjadi kultur dari masyarakat yang tinggal di Kampung Arab

Al-Munawar yang masih memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam dalam menjalani kehidupan.

Bentuk kesetaraan gender didalam keluarga dengan latarbelakang pendidikan tinggi tersebut dapat diketahui dari sisi orangtua yang sudah memiliki kesadaran bahwa peranan mereka dalam hal ini sebatas mendukung dari segi materi maupun moral terhadap keputusan anak perempuannya tanpa melakukan intervensi terlalu banyak. Berikut ini merupakan petikan wawancara dari informan Tri Novtiar Aminudin:

“Kalo soal tempat kuliah itu kehendak sendiri, kan yang menjalankannya nanti saya. Tapi orang tua juga mendukung dengan pilihan saya.” (wawancara, 19 Juli 2019).

Bentuk kesetaraan gender dalam keluarga tersebut, ditandai adanya keterbukaan akses anak dalam menempuh pendidikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebagai anak perempuan, melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi tentu bukan merupakan prioritas utama. Namun, latar belakang keluarga yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi memberikan kontribusi bagi setiap anggota keluarga untuk menjadi individu yang berpikiran terbuka. Hal ini dibuktikan dari sikap orangtua yang mengikutsertakan anak perempuan untuk berdiskusi bersama membahas tentang pilihan-pilihan yang mungkin akan ditempuh oleh anaknya untuk melanjutkan sekolah.

2. Akses Kesehatan

Terkadang penerapan konsep kesetaraan gender dalam bidang kesehatan harus terbentur oleh beberapa faktor, seperti adat istiadat, hukum, ekonomi, sosial, dan agama. Kesetaraan gender dalam bidang kesehatan dapat diwujudkan apabila ada kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat untuk saling bekerjasama dan memahami satu sama lain.

Pada dasarnya, dalam hal penanganan setiap anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terdapat lagi perlakuan berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika terdapat anggota keluarga yang sakit, maka anggota keluarga lainnya berkewajiban untuk segera memberikan layanan kesehatan. Perbedaan perlakuan tergantung pada ringan atau beratnya jenis penyakit. Apabila penyakit dinilai masih ringan maka cukup hanya dengan memberikan obat-obatan yang bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat. Sementara apabila jenis penyakit sudah tergolong berat, maka anggota keluarga merasa wajib untuk membawa orang yang sakit tersebut ke klinik, puskesmas, atau rumah sakit terdekat.

Pada umumnya tidak ada perlakuan berbeda dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun dalam masalah pencukupan

gizi kepada setiap anggota keluarga, masyarakat yang tinggal di Kampung Arab Al-Munawar juga tidak membedakan atas nama gender. Saat makan, tidak ada yang didahulukan atau mendapat porsi makan yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Setiap orang makan pada waktu dan tempat yang sama. Hal yang membedakan adalah ketika masyarakat Kampung Arab Al-Munawar sedang mengadakan acara makan bersama dimana tempat makan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur. Keterangan mengenai bentuk kesetaraan gender dalam hal pencukupan gizi bagi anggota keluarga dapat diketahui dari kutipan wawancara bersama informan Rogayah Al-Habsyi sebagai berikut:

“Kalau makan rame-rame, makan nasi kebuli. Kalau pas ada acara haul, itu sebulan sebelum bulan puasa rame disini, ada empat sampai enam pasangan yang menikah. Bareng kalau makan, hanya di pisah tempat saja. Laki dengan laki kan dan yang ceweknya dengan cewek jago, idak digabung.” (wawancara, 17 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa kesetaraan terjadi pada saat acara pernikahan maupun acara besar lainnya, dimana saat makan seorang perempuan dihormati sebagaimana seorang laki-laki juga dihormati, kedudukan mereka sejajar, yang membedakan hanyalah tempat makan laki-laki dengan perempuan dipisah. Sedangkan untuk waktu makan dan menunya disamakan.

3. Akses Ekonomi

Adapun dalam mengelola sumber daya ekonomi, bentuk kesetaraan gender dapat dilihat dari adanya konsensus bersama antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pengelolaan berupa pembelian dan pengeluaran dalam rangka mencukupi kebutuhan rumah tangga. Didalam keluarga, tidak diperkenankan ada pengendalian atau pelimpahan penuh pada salah satu pihak untuk mengelola sumber daya ekonomi seperti halnya keuangan.

Masyarakat suku Arab yang berdomisili di Kampung Arab Al-Munawar memiliki pandangan yang beragam terkait apakah setiap orang dapat beraktifitas atau bekerja di ruang publik atau sebaliknya. Akan tetapi, salah satu masyarakat Kampung Arab Al-Munawar, yakni informan Abdullah Al-Kaff menyatakan bahwa dirinya tidak melarang sama sekali bagi laki-laki maupun perempuan untuk bekerja di sektor publik. Menurutnya, orang-orang yang bekerja diluar publik atau domestik tergantung pada tingkat pendidikannya. Akan sangat sulit membatasi wilayah kerja pada orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan memiliki masa depan yang

baik, seperti halnya dokter. Berikut ini adalah hasil petikan wawancara bersama informan Abdullah Al-Kaff sebagai berikut:

“Itu boleh-boleh bae. Tergantung sumber daya manusianya. Kalo orang yang dari sekolahan, dari universitas, mungkin dia gak mau di rumah. Apa dia dokter, apa dia apa kan. Pasti dia meneruskan karier. Ada juga guru poltek dekat sini, Bu Aisyah, yang masih keluarga saya yang ngajar di poltek.” (Wawancara 17 Agustus 2019)

Dalam hal ini, informan Abdullah Al-Kaff merasa tidak ada rasa keberatan pada dirinya apabila perempuan didalam keluarganya hendak bekerja di sektor publik. Namun informan Abdullah Al-Kaff mensyaratkan bahwa semua itu harus sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Informan Abdullah Al-Kaff memberikan contoh bahwa ketika seseorang telah menempuh pendidikan kedokteran, tentu ia akan menolak apabila hanya mengurus kebutuhan rumah tangga dan menanggalkan cita-citanya untuk berprofesi sebagai seorang dokter. Selain itu, bentuk kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dibuktikan dari adanya keleluasaan yang diberikan didalam keluarga Al-Kaff untuk bekerja di sektor publik. Akan tetapi, sektor publik yang dapat diakses oleh kaum perempuan di Kampung Arab Al-Munawar masih terbatas pada sektor-sektor tertentu, seperti menjadi seorang guru, dosen, atau penceramah di kajian-kajian kemuslimahan.

Kesetaraan gender dalam keluarga pada masyarakat di Kota Palembang lainnya juga dapat ditemui pada keluarga informan Sarmidi yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Penghasilan sebagai karyawan swasta yang belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara penuh membuat istrinya turut bekerja sebagai buruh jamur. Informan Sarmidi menyatakan bahwa dirinya tidak melarang istrinya untuk bekerja dengan syarat pekerjaan-pekerjaan domestik tidak terbengkalai. Informan Sarmidi menuturkan alasannya mengizinkan istri untuk turut bekerja di sektor publik sebagai berikut:

“Boleh asal tidak terlalu capek. Itu kan kehendak beliau, tidak dikekang juga. Asal masih bisa ngurusin rumah gak masalah.” (wawancara, 19 Juli 2019).

Bentuk kesetaraan gender dalam keluarga informan Sarmidi dapat diketahui dari mulai adanya kesadaran gender dari pihak kepala keluarga yang menganggap bahwa perempuan yang bekerja di ruang publik merupakan hak daripada perempuan itu sendiri. Informan Sarmidi sama sekali tidak mengekang atau membatasi apa yang hendak dilakukan anggota keluarganya asalkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya tidak dilalaikan, seperti halnya istri yang tidak lupa terhadap kewajibannya mengurus

rumah tangga. Akses yang diberikan dalam beraktifitas di ruang publik dan kesadaran gender yang mulai muncul merupakan bentuk-bentuk dari kesetaraan gender yang dapat dilihat dari keluarga informan Sarmidi.

Bentuk kesetaraan gender didalam keluarga tersebut yaitu adanya kebebasan untuk dapat bekerja pada sektor publik. Bahkan bagi beberapa informan, pekerjaan di sektor publik lebih menjadi prioritas utama dibandingkan pekerjaan domestik. Selain itu, juga ada yang suami tidak memberi syarat apapun kepada istri agar diberikan izin bekerja di sektor publik.

2. Latar Belakang Terwujudnya Kesetaraan Gender pada Keluarga di Kota Palembang

1. Latar Belakang Pendidikan

Kondisi sosio-kultural masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain menghasilkan persepsi yang berbeda pula mengenai konsep gender. Semakin baik konsep gender yang dipahami oleh masyarakat maka akan semakin terbuka jalan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun tinggi atau rendahnya kualitas gender dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti agama, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Masyarakat suku Arab di Kampung Arab Al-Munawar, 13 Ulu, Kota Palembang percaya bahwa pendidikan sangat penting untuk diberikan oleh setiap anak tanpa adanya perbedaan akses yang didasarkan atas faktor gender. Menjalani kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran agama Islam tidak membuat setiap orangtua menghalangi anak-anaknya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Justru para orangtua di Kampung Arab menghendaki anak-anaknya kelak dapat tumbuh dan berkembang sebagai seorang yang berpendidikan dan berpengetahuan, terutama dalam bidang keagamaan.

Selanjutnya, tingkat pendidikan orangtua juga turut menjadi faktor yang melatarbelakangi terwujudnya kesetaraan gender didalam keluarga. Seorang berpendidikan biasanya memiliki cara pandang yang lebih luas disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Maka dalam menentukan pendidikan anak-anaknya, orangtua yang berpendidikan tidak lagi berpikiran apakah anak perempuan juga sama pentingnya untuk menempuh sekolah yang tinggi sebagaimana anak laki-laki.

Informan Netti Agustini, S.Pd merupakan contoh dari orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Dalam bidang pendidikan, informan Netti Agustini, S.Pd menyatakan bahwa dua dari tiga anaknya saat ini sedang mengenyam pendidikan di Sekolah

Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang merupakan pilihan dari anaknya sendiri. Selain itu, bentuk kesetaraan gender dalam potret keluarga Netti Agustini, S.Pd dapat dilihat dari adanya pembagian tugas-tugas domestik sekalipun anak-anak dari informan Netti Agustini, S.Pd semuanya adalah laki-laki. Berikut ini hasil petikan wawancara bersama informan Netti Agustini, S.Pd:

“Lanjut kuliah semua. Kebetulan ketiganya kuliah di STAN jadi kalo sudah lulus tidak payah cari kerja lagi. Tinggal yang bungsu yang masih sekolah” (wawancara, 19 Juli 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa latar belakang seseorang dengan pendidikan yang baik memiliki kecenderungan untuk berpikiran lebih terbuka (*open minded*). Informan Sukahat sama sekali tidak membedakan perlakuan kepada setiap orang yang menjadi bagian dari keluarganya. Informan Sukahat memberi kebebasan kepada istri, anak-anak, bahkan pembantunya untuk melakukan semua yang menjadi keinginannya. Informan Sukahat hanya memberikan syarat bahwa kebebasan yang diberikan tetap merupakan kebebasan yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab untuk selalu ingat kepada Tuhan, menjaga nama baik keluarga, dan tidak melanggar nilai dan norma.

2. Latar Belakang Ekonomi Keluarga

Kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terpenuhi akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Namun kenyataannya masih terdapat ketimpangan ekonomi dikarenakan keterbatasan akses dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu faktor yang seringkali menjadi penghalang adalah keadaan bias gender pada masyarakat dimana perempuan masih ditempatkan pada posisi yang sub-ordinat.

Setiap manusia dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan diri agar bisa beradaptasi dan menjawab tantangan zaman, tak terkecuali bagi kaum perempuan. Saat ini ada banyak kaum perempuan yang turut serta berperan aktif demi menyokong kebutuhan ekonomi keluarga. Peran perempuan bukan hanya sekedar menjadi *konco wingking*, tetapi berperan juga dalam meningkatkan taraf hidup keluarga.

Suku Arab merupakan salah satu komunitas yang masih belum menerima dan menerapkan konsep gender didalam kehidupannya. Namun, kini perempuan suku Arab mulai menunjukkan eksistensinya di muka publik meski masih bersifat terbatas. Salah satu contoh perempuan suku Arab yang beraktivitas di ruang publik adalah informan Zakiyah istri dari Baradba Shahab. Informan Zakiyah ialah seorang pedagang yang hanya akan berjualan apabila di Kampung Arab Al-Munawar sedang diadakan suatu acara, seperti festival atau haul.

Berikut ini merupakan hasil penuturan informan Baradba Shahab terkait alasannya memberikan izin kepada Zakiyah untuk bekerja di sektor publik sebagai seorang pedagang:

“Itulah tadi, paling istri dagang pas ada acara rame-rame disini (Kampung Arab). Kan tiap tahun tu galak ado haul di dermaga sano. Rame itu yang datang. Ratusan wong ado.”

“Itulah tadi, paling istri dagang pas ada acara ramai-ramai disini (Kampung Arab). Kan setiap tahun itu sering ada acara haul di dermaga sana. Ramai itu yang datang. Ratusan orang ada.” (Wawancara 17 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa adanya perempuan yang bekerja di ruang publik pada masyarakat Suku Arab tergantung pada momentum tertentu. Misalnya ketika Kampung sebagai kampung wisata sedang mengadakan acara yang akan mendatangkan banyak pengunjung. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh setiap warga untuk menambah pendapatan keluarga, salah satunya dengan cara berdagang. Perempuan dipilih dalam peran berdagang dengan alasan kebanyakan laki-laki di Kampung Arab banyak yang bekerja atau berdagang diluar kawasan kampung, seperti di wilayah Pasar 16 Ilir.

3. Faktor Penghambat Kesetaraan Gender pada Keluarga di Kota Palembang

1. Faktor Agama yang dianut

Agama sebagai suatu keyakinan yang telah ada dan hidup dalam suatu masyarakat untuk mengajarkan budi pekerti, nilai keadilan, mengkokohkan keyakinan yang manusia untuk taat kepada sang pencipta. Namun penafsiran ajaran kitab suci tentang nilai dan budaya yang diajarkan terkadang salah dalam mengamalkannya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara mendalam, ditemukan fakta bahwa nilai dan ajaran agama yang masih dipegang teguh oleh sebagian keluarga yang ada di Kota Palembang justru yang menjadi penghambat terwujudnya kesetaraan gender dalam keluarga.

Ditemukan suatu kondisi dimana secara umum keluarga di kota Palembang masih memiliki konstruksi pemikiran bahwa seorang laki-laki atau suami adalah seorang yang memiliki tugas dan pekerjaan di luar rumah atau pada sektor publik, sedangkan perempuan (istri) yaitu memiliki tugas dan pekerjaannya di dalam rumah atau mengurus pekerjaan domestik yaitu mengurus segala pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci, memasak dan menyapu rumah.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan Ahmad Husin Al-Kaff tentang kedudukan seorang laki-laki dalam sebuah keluarga. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ar’rijaalu qowwaamuuna’alan nisaaa (surat An-Nisa ayat 34). Artinya: laki-laki (suami) itu adalah pemimpin/pelindung bagi perempuan. Ayat itu sudah jelas dalam Al-Qur’an, apalagi orang arab yang sebagai penyebar agama, tentu orang laki-laki lah yang mengambil keputusan, gak bisa lah orang perempuan mengambil keputusan. Yang menyebarkan agama kok jadi begitu” (wawancara, 16 Agustus 2019).

Mengacu pada kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa seorang suami dalam agama Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang istri. Kedudukan suami dalam keluarga Islam adalah sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya dan sekaligus sebagai pelindung bagi perempuan. Jadi segala sesuatu dalam sebuah rumah tangga harus diketahui oleh seorang suami, jadi secara kekuasaan, laki-laki menjadi penguasa dan segala keputusan yang berhak memutuskan hanyalah suami, sedangkan istri tidak memiliki hak untuk memutuskan suatu perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari seorang suami.

Bentuk ketidaksetaraan gender lainnya pada Keluarga di Kota Palembang yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dapat memerintahkan istri untuk tetap di rumah, mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan domestik dan istrinya tidak diberikan izin oleh sebagian suami untuk bekerja pada sektor publik.

Akhirnya, berdasarkan deskripsi tentang agama yang menjadi salah satu faktor penghambat kesetaraan gender pada keluarga di kota Palembang. Maka untuk dapat merubah cara pandang masyarakat, khususnya pada keluarga di Kota Palembang terhadap nilai-nilai agama yang dianut dan menjadi keyakinan yang sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi dalam beragama, jika seorang dengan menggunakan alasan agama, seorang rela mati demi memperjuangkan agama yang telah diyakini benar dan karena sebagian besar masyarakat di Kota Palembang masih memegang teguh nilai-nilai agama yang dianutnya.

2. Faktor Tradisi dan Budaya

Dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan dengan adanya perkembangan dan kemajian di bidang teknologi maupun ilmu pengetahuan. Namun faktanya, dalam hal norma dan nilai justru norma dan nilai berkembang sangat lambat, karena untuk mengubah suatu budaya diperlukan waktu yang lama, karena telah mendarah daging pada setiap aktivitas kehidupan sosial.

Perubahan tersebut dapat berupa perubahan perilaku seperti perubahan peran dalam pencari nafkah, perubahan status perempuan salah satunya melalui jalur pendidikan, namun dalam segi perubahan nilai dan norma, justru berjalan sangat lambat.

Fenomena demikian ini juga terjadi pada kehidupan masyarakat suku Arab. Kehidupan suku Arab di kampung Al-Munawar secara sosial telah sedikit mengalami perubahan-perubahan, namun yang menjadi penghambat yaitu karena faktor budaya dan tradisi masyarakat yang sulit untuk dirubah.

Adapun ketidaksetaraan gender paling menonjol yang terjadi pada masyarakat suku Arab ini disebabkan faktor tradisi, berupa ketidaksetaraan gender pada bidang perkawinan. Dimana ada tradisi yang telah berkembang sejak lama pada masyarakat suku Arab di Kampung Al-Munawar yaitu seorang perempuan suku Arab tidak boleh menikah dengan suku di luar suku Arab. Artinya seorang perempuan suku Arab di Kampung Al-Munawar hanya dapat menikah dengan suku Arab saja. Sedangkan seorang laki-laki suku Arab di Kampung Al-Munawar bebas menikah dengan perempuan suku mana saja.

Semua hal tersebut yaitu bersumber dari observasi dan wawancara. Salah satunya yaitu dengan Informan Ahmad Husin Al-Kaff yang mengungkapkan tentang alasan perempuan Arab tidak boleh menikah dengan suku lain. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau saya boleh, Kalau Perempuan suku arab tidak boleh menikah dengan suku lain, sangsinya merka terisolir, dan termasuk suatu aib bagi keluarga kami. ada pelanggaran disini. Kesukuan (asobiyah) itu tetap ada di orang arab. Kalau Alasannya wanita tidak bisa menikah dengan suku lain karena kami merasa, kami masih ada tetesan darah dari rasulullah, kalau perempuan nikah dengan suku lain maka putus sudah nasabnya dari rasulullah. Kalau laki-laki mengambil (nikah) dengan suku lain, maka perempuan itu beruntung bisa nikah dengan kami, karena kami masih ada keturunan rasulullah di dia nanti. Di keluarga saya sendiri ada yang melanggar bukannya tidak ada, kalau mau kembali lama itu lama bisa dianggap keluarga lagi, bahkan untuk nelpon saja malu, karena itu merupakan suatu aib” (wawancara, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ahmad Husin Al-Kaff diketahui bahwa laki-laki suku Arab boleh menikah dengan perempuan suku lain, sedangkan perempuan suku Arab tidak boleh, karena dianggap sebagai suatu pelanggaran adat. Jika dilanggar

maka perempuan tersebut akan terisolir dan menjadi aib bagi keluarganya. Hal tersebut muncul karena sifat kesukuan (asobiyah) atau etnosentrisme itu tetap ada pada orang-orang suku Arab.

Adapun alasannya yaitu karena orang-orang suku Arab merasa bahwa mereka masih memiliki tetesan darah dari Rasulullah Muhammad, kalau perempuan Arab menikah dengan dengan suku lain maka akan terputus nasab dari Rasulullah. Sedangkan kalau laki-laki suku Arab menikah dengan suku lain, maka perempuan tersebut beruntung dapat menikah dengan laki-laki suku Arab, karena mereka masih ada keturunan dari Rasulullah.

3. Kondisi Sosial Masyarakat Setempat

Lingkungan permukiman merupakan bagian dari lingkungan binaan, dan lingkungan binaan merupakan bagian dari lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa adanya suatu permukiman maka telah hadir juga suatu peradaban dan kebudayaan (Kuswartojo, 2010).

Maka berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa dilingkungan tempat tinggal masyarakat suku Arab di Kampung Arab Al-Munawar, lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya kesetaraan gender pada masyarakat suku Arab.

Kondisi sosial masyarakat di Kampung Arab Al-Munawar menjadi salah satu penghambat kesetaraan gender yaitu karena status Kampung Al-Munawar yang kini sebagai kampung wisata religi atau islami di kota Palembang membuat setiap warga Kampung Al-Munawar menunjukkan untuk tetap menerapkan syariat Islam secara *kaffah* (keseluruhan), mulai dari aktivitas sosial sampai pada aktivitas dalam rumah tangga yang condong pada nilai dan norma yang Islam ajarkan. Maka dari latar belakang kampung yang religius ini ajaran islam tetap diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kampung Al-Munawar.

Salah satu nilai Islam yang telah diterapkan yaitu seorang wanita suku Arab sangat dijaga kehormatannya, sehingga seorang wanita Arab tidak diberikan izin untuk banyak beraktivitas dalam kegiatan yang bersifat umum diluar rumah (sektor publik), karena wanita Arab sangat dijaga kehormatannya. Hal ini terlihat jelas pada kehidupan masyarakat suku Arab ketika di siang hari. Dimana akan sangat jarang ditemui seorang perempuan yang telah bersuami untuk keluar rumah ataupun berdagang. Kaum perempuan suku Arab di Kampung Al-Munawar justru lebih banyak beraktivitas dalam rumah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh informan Muhammad Abdul Kadir

Al-Munawar pada saat wawancara dilakukan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Perempuan disini kebanyakan menjadi ibu rumah tangga. 99% (persen) ibu rumah tangga. Jarang yang keluar dagang. Mungkin kalo orang lain bisa ya, kami (orang Arab) tidak” (wawancara, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Muhammad Abdul Kadir Al-Munawar diketahui bahwa kegiatan perempuan suku Arab sangat dibatasi. Jangankan untuk bekerja pada sektor publik, berdagang dan keluar dari rumah saja sangat dibatasi, karena dalam masyarakat suku Arab, jika seorang perempuan keluar rumah sudah dianggap tidak bagus oleh masyarakat yang lain, apalagi untuk berdagang dan bekerja. Kalupun keluar rumah, perempuan suku Arab di Kampung Al-Munawar hanya pada acara-acara tertentu, misalnya seperti acara keluarga, acara pernikahan ataupun acara peringatan hari besar Islam.

KESIMPULAN

1. Bentuk kesetaraan gender pada keluarga di kota Palembang terbagi menjadi 3 diantaranya yaitu:
 - 1) Kesetaraan gender dalam akses pendidikan yaitu bagi orangtua yang memiliki latar belakang agama yang kuat yaitu adanya pembatasan akses pendidikan yang diterapkan pada anak laki-laki maupun perempuan dan adanya kesempatan yang sama bagi anak untuk memilih pendidikan yang dikehendaki dengan syarat tidak mengenyampingkan pendidikan berbasis Islam (mengaji), sementara bagi orangtua dengan latar belakang pendidikan umum kesetaraan gender yaitu berupa adanya keterbukaan akses anak dalam menempuh pendidikan sesuai dengan yang dikehendakinya, sedangkan dalam keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi yaitu adanya kesadaran orangtua bahwa peranan orang tua dalam pendidikan anak hanya sebatas mendukung dari segi materi maupun moral terhadap keputusan anak tanpa melakukan intervensi terlalu banyak.
 - 2) Kesetaraan gender dalam akses kesehatan yaitu berupa tidak ada perlakuan berbeda dalam memberikan akses pelayanan kesehatan, pencukupan gizi dan ketika makan bagi laki-laki maupun perempuan.
 - 3) Kesetaraan gender dalam akses ekonomi yaitu adanya keleluasaan perempuan dalam keluarga

untuk dapat bekerja di sektor publik. Akan tetapi, sektor publik yang dapat diakses oleh kaum perempuan berlatar belakang agama masih kuat terbatas pada sektor tertentu, seperti menjadi seorang guru, dosen, atau penceramah di kajian-kajian kemuslimahan, sedangkan pada masyarakat umum lainnya kesetaraan dalam akses ekonomi yaitu mulai adanya kesadaran gender dari pihak kepala keluarga yang menganggap bahwa perempuan yang bekerja di ruang publik merupakan hak daripada perempuan itu sendiri, tidak adanya batasan yang hendak dilakukan anggota keluarganya asalkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya tidak dilalaikan.

2. Hal yang melatarbelakangi terwujudnya kesetaraan gender pada keluarga di kota Palembang diantaranya yaitu:

- 1) Latar belakang pendidikan yaitu terwujudnya kesetaraan gender di dalam keluarga karena seorang berpendidikan memiliki cara pandang yang lebih luas disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Maka dalam menentukan pendidikan anak-anaknya, orangtua yang berpendidikan berpikiran anak perempuan juga sama pentingnya untuk menempuh sekolah yang tinggi sebagaimana anak laki-laki. Latar belakang seseorang dengan pendidikan yang baik memiliki kecenderungan berpikiran lebih terbuka (*open minded*).
- 2) Latar belakang ekonomi keluarga yaitu adanya latar belakang keadaan ekonomi keluarga yang sulit justru menjadi sebab perempuan dapat bekerja di ruang publik, khususnya pada masyarakat Suku Arab yang membolehkan istri bekerja berdagang pada momentum-momentum tertentu. Misalnya ketika Kampung sedang mengadakan acara yang mendatangkan banyak pengunjung datang, maka kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh setiap warga untuk menambah pendapatan keluarga, salah satunya dengan cara berdagang.

3. Faktor penghambat kesetaraan gender pada keluarga di kota Palembang diantaranya:

- 1) Faktor agama yang dianut yaitu adanya nilai dan ajaran agama, serta konstruksi pemikiran yang di bungun dalam beragama menganggap bahwa seorang laki-laki atau suami memiliki tugas dan pekerjaan di luar rumah atau pada sektor publik, sedangkan perempuan (istri) memiliki tugas dan pekerjaannya di dalam rumah atau mengurus pekerjaan domestik. Bentuk ketidaksetaraan gender lainnya yaitu

suami sebagai kepala rumah tangga dapat memerintahkan istri untuk tetap di rumah, mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan domestik dan istrinya tidak diberikan izin oleh sebageian suami untuk bekerja pada sektor publik.

- 2) Faktor tradisi dan budaya yaitu karena adanya budaya patriarki yang sangat kuat dalam mengaunggulkan kaum laki-laki. Selain itu adanya ketidaksetaraan gender pada bidang perkawinan, karena adanya ketidakadilan pernikahan bagi perempuan. Dimana seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki diluar sukunya, sedangkan seorang laki-laki bebas untuk menikah dengan perempuan suku mana saja. Jika perempuan sampai menikah dengan suku lain maka dianggap sebagai suatu pelanggaran adat. Jika dilanggar maka perempuan tersebut akan terisolir dan menjadi aib bagi keluarganya, ini dilakukan dengan dalih untuk menjaga nasab agar tidak putus dan tidak hilang.
- 3) Faktor kondisi sosial masyarakat setempat yaitu adanya ketidaksetaraan gender karena status kampung sebagai kampung wisata religi atau islami, sehingga membuat setiap warga kampung menunjukkan untuk tetap menerapkan syariat Islam secara *kaffah* (keseluruhan), mulai dari aktivitas sosial sampai pada aktivitas dalam rumah. Selain itu, pada lingkungan sosialnya kegiatan perempuan sangat dibatasi, jangankan untuk bekerja pada sektor publik, berdagang dan keluar dari rumah saja sangat dibatasi, karena dalam masyarakat tersebut menilai jika seorang perempuan keluar rumah itu tidak bagus oleh masyarakat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampera, Dina. 2012. *Kajian Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD*. Jurnal Tabularasa Volume 9, Nomor 2: 167-182.
- Astuti, Indah. 2010. *Relasi Gender Pada Keluarga Perempuan Pedagang di Pasar klewer kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. <https://core.ac.uk/display/12346956>. Diakses 13 Oktober 2019.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

- Creswell, Jhon W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Edisi ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fibrianto. 2016. *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi mahasiswa Universitas Sebelas maret Surakarta Tahun 2016*. Jurnal Analisa Sosiologi Volume 5, Nomor 1: 14-35.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuswartojo. 2010. *Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Permukiman*. Bandung: Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- Mahpur. 2012 *Baseline Study Kesetaraan Gender di UIN Malang*. Jurnal Egalita Volume 1, Nomor 2: 24-37.
- Moser, Caroline. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London: Routledge.
- Widayani, Hartati. 2014. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan di Bali*. Jurnal Psikologi Undip Volume 13, Nomor 2:28-36.